

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Oleh :

R. Didi Djadjuli

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis

Abstrak

Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya, banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunannya yaitu ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan dampak pada pembangunan ekonomi daerah, akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut juga dapat diatasi dengan strategi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, atau menjalankan strategi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu menurut pendapat Arsyad (2000) strategi pengembangan fisik, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan masyarakat, strategi-strategi tersebut minimal membantu atau salah satu rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang ada pada persoalan-persoalan perekonomian daerahnya sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Strategi, Pembangunan Ekonomi.

A. Pendahuluan

Definisi dari pembangunan dalam literatur-literatur ekonomi yaitu sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya.

Kalau kita bicarakan pembangunan semata-mata, tentu saja harus dalam konteks yang luas, karena pembangunan harus mencakup segala segi dalam kehidupan manusia, dengan demikian penulis mengkhususkan pada pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan judul yang penulis buat di atas. Berbicara mengenai pembangunan ekonomi, maka tidak akan lepas dari tujuan dari pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi. Teori-teori pertumbuhan ekonomi dapat ditelusuri setidak-tidaknya sejak abad ke 18. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan diawali apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja, pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga menggaris bawahi pentingnya skala ekonomi, dengan meluasnya pasar, akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Banyak teori-teori ekonomi dengan melalui pendekatan-pendekatan yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi, seperti Adam Smith pemikir klasik dengan 'invisiblehand' nya, Karl Marx dengan 'ekonomi terpimpinnya, David Ricardo dengan keunggulan komparatifnya, Keynes dengan kebebasan dan pengaturan pemerintah-nya, pertumbuhan ekonomi yang seimbang akan dengan suntikan nilai-nilai maju yakni yang percaya bahwa hanya perubahan secara struktural yang bisa membuat negara berkembang menjadi maju.

Dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana peran pemerintah daerah menjadi lebih besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk didalamnya dalam hal pembangunan ekonomi. Dengan adanya desentralisasi dimana pemerintah memberikan kewenangan, keleluasaan kepada tiap-tiap daerah untuk mengembangkan pembangunan ekonomi berdasarkan potensi daerahnya, namun sejak diberlakukan otonomi daerah sampai sekarang, masih banyak daerah-daerah yang pembangunan ekonominya tidak meningkat padahal kalau dilihat potensi daerahnya memungkinkan daerah tersebut ekonominya meningkat. Banyak

kendala-kendala yang dihadapi untuk membangun ekonomi suatu daerah, tetapi kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan menjalankan langkah-langkah ataupun strategi dari teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi, tinggal teori mana yang harus dijalankan dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada daerah yang bersangkutan. Mengacu pada hal tersebut di atas, maka hal yang paling mendasar yaitu keinginan yang kuat dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya, tanpa itu jangan harap ekonomi daerah akan meningkat yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dimana masyarakat dengan perekonomiannya tidak pernah tumbuh dan berkembang sehingga pertumbuhan ekonomi tertinggal dibanding pertumbuhan ekonomi daerah lainnya yang memang pemerintahnya sangat peduli terhadap pembangunan ekonominya.

Pembangunan ekonomi daerah melalui mekanisme pengambilan keputusan ekonomi dari para pemangku kepentingan dipastikan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dalam ketimpangan alokasi sumber daya dalam pembangunan ekonomi daerah. Otonomi dalam administrasi pembangunan ini dirasakan makin urgen dan sejalan dengan keragaman sosial dan ekologi pada suatu wilayah.

Penerapan pembangunan ekonomi daerah biasanya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi daerah tersebut, kebijakan daerah tertentu akan berbeda dengan kebijakan daerah yang lainnya karena setiap daerah mempunyai kelebihan dan kekurangan terhadap potensi kekayaan alam serta sumber-sumber yang lainnya, keputusan politik dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dikaitkan dengan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan secara tidak langsung dapat mendukung dalam pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh daerah menjadi prioritas pembangunan nasional contohnya yaitu pendidikan, kesehatan dll.

B. Pembahasan

I. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam undang-undang otonomi daerah, dalam ketentuan umum yang dimaksud pemerintah ada dua pengertian. Yang pertama adalah pemerintah pusat atau disebut pemerintah adalah presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Yang kedua adalah pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Adapun penyelenggara pemerintah yaitu presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden serta menteri-menteri negara. Sedangkan penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya, dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian.

- 1) Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan diberbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, sosial budaya, geografisnya dan lain-lain. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.
- 2) Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi, ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal.
- 3) Suatu daerah adalah suatu ekonomi, ruang yang berada dibawah suatu administrasi tertentu seperti provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan lain-lain. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang artinya pemerintah harus dapat meningkatkan pendapatannya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, kesehatannya, pendidikannya dan lain-lain termasuk rasa aman dan terlindungi dalam lingkungan dimana dia hidup.

Menurut Sedarmayanti (2013: 2) Globalisasi dan revolusi telah membuat desentralisasi bukan hanya sebuah kebutuhan politik semata tetapi juga kebutuhan ekonomi. Investor tidak lagi cukup hanya melihat potensi investasi di suatu negara, tetapi bagaimana dan daerah mana yang menawarkan kemungkinan-kemungkinan paling menguntungkan, ada faktor-faktor lain selain potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia daerah dan ketersediaan infrastruktur, juga karakteristik pemerintah daerah, sikap masyarakat lokal terhadap

investasi dari luar. Daerah juga dapat peluang besar untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif maupun kompetitif yang dimiliki untuk memasuki pasar global. Globalisasi disamping sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan budaya bangsa, juga membuka peluang dan kesempatan bagi yang mampu memanfaatkan peluang.

II. Pengertian Pembangunan

Ada dua pengertian mengenai pembangunan, yang pertama yaitu pembangunan fisik dan yang kedua adalah pembangunan non fisik. Tujuan dari kedua pembangunan tersebut adalah membangun seluruh masyarakat atau bangsa demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat.

Menurut Afifuddin (2012: 42-47) pembangunan mempunyai beberapa pengertian yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Beberapa pengertian tersebut ialah;

1. Pembangunan adalah perubahan

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Karena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi kehidupan yang lainnya.

2. Pembangunan adalah pertumbuhan

Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang secara kuantitatif maupun secara kualitatif, cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan, sebagai wujud implementasinya tidak ada satupun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan. Adalah hal yang tepat dan wajar apabila ide pertumbuhan mendapat penekanan dan sorotan dalam pembangunan, karena secara filsafat dapat dikatakan bahwa suatu organisme, karena suatu negara dipandang suatu organisme.

Sejalan dengan pernyataan atau pendapat dari Pamudji S. (1989) "dimana suatu negara dapat dikatakan suatu organisme"

3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan

Keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan, berarti bahwa baik secara

konseptual maupun secara operasional, tujuan dari berbagai dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional. Suatu kondisi ideal yang merupakan salah satu sasaran pembangunan ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

4. Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi apapun tujuannya, apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, penelitian yang amat kausal menunjukkan bahwa dalam semua literatur tentang administrasi maupun manajemen, pasti akan terlihat adanya kesepakatan para ahli untuk mengatakan bahwa perencanaan tidak bisa tidak harus dilakukan dalam rangka usaha pencapaian tujuan organisasi dan perencanaan merupakan fungsi organik manajemen yang pertama dan diikuti oleh fungsi-fungsi manajemen yang lainnya.

Kalau kita lihat fungsi perencanaan dalam manajemen, ada beberapa pemikiran yang dituangkan dalam definisi tersebut.

- a. Perencanaan atau rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Hasibuan: 2012)
- b. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai (G. R. Terry, dalam Ticoalu G. A. 2013: 43-44)
- c. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan. (Hani Handoko, 2003: 78)
- d. Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan?, bilamana akan dilakukan?, dan siapa yang akan melakukan?. (Afifuddin, 2012: 87)

Sesuai dengan pendapat Afifuddin,(2012: 95), beberapa fungsi dalam perencanaan meliputi:

1. Dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional, rencana merupakan alat efisiensi dan efektivitas untuk menghindari pemborosan berkat keterarahan kegiatan untuk mencapai tujuan;
 2. Dengan rencana yang matang, dilakukan perkiraan keadaan mengenai hal-hal yang prospek pada perkembangan masa depan yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi;
 3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang diduga merupakan cara terbaik, setelah melalui pengkajian mendalam, dapat memberi petunjuk tentang cita-cita setiap alternatif yang ada, baik sifatnya positif maupun negatif;
 4. Dengan adanya rencana, tergambar pula jenis dan bentuk satuan-satuan kerja penyelenggara semua kegiatan yang sifatnya berlanjut dan oleh karenanya melembaga;
 5. Dengan rencana, dapat ditetapkan standar prestasi yang baku yang antara lain berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan usaha;
 6. Rencana dapat dijadikan sebagai dasar utama untuk penjabaran program kerja secara sistematis;
 7. Dengan adanya rencana, jumlah, jenis keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan dapat ditetapkan dengan lebih akurat;
 8. Rencana menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, bahkan juga penilaian;
 9. Implikasi pembiayaan pun dapat terlihat dengan jelas dalam suatu rencana;
 10. Dengan rencana yang jelas, sarana dan prasarana kerja yang mutlak diperlukan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya;
5. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan bangsa
- Pada umumnya komponen-komponen dari cita-cita akhir negara-negara modern baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang adalah hal-hal yang pada hakekatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya titik jenuh yang absolut yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti ;
- a. Keadilan sosial
 - b. Kemakmuran yang merata.
 - c. Perlakuan sama dimata hukum
 - d. Kesejahteraan material, mental dan spiritual
 - e. Kebahagiaan untuk semua
 - f. Ketentraman dan
 - g. Keamanan.
- Semuanya dapat disimpulkan kebahagiaan lahir dan batin, ideologi apapun yang dianut oleh suatu negara atau bangsa, struktur politik apapun yang terdapat dalam masyarakat, sistem perekonomian yang bagaimanapun yang berlaku dan tata sosial budaya yang bagaimanapun yang menjiwai kehidupan masyarakat, kebahagiaan lahir batinlah yang akan dicapai.
- Dalam hubungannya dengan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi, hal tersebut juga merupakan definisi yang harus dijabarkan untuk dapat merealisasikan tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu masyarakat yang makmur dan sejahtera.
- Yang pertama yaitu pembangunan merupakan perubahan, perubahan dalam hal ini yaitu perubahan-perubahan dalam hal faktor produksi yaitu:
- a. Ada kegiatan yang bertambah
 - b. Modal uang yang diinvestasikan bertambah
 - c. Sumber daya alam menjadi lebih mudah didapat
 - d. Kualitas sumber daya manusia meningkat
 - e. Lahan/tanah yang tadinya tidak efektif menjadi efektif
- Perubahan-perubahan pada faktor produksi tersebut di atas merupakan unsur penting dalam perubahan pembangunan ekonomi, karena hal tersebut merupakan perangkat atau sebagai alat yang dapat menumbuhkan perekonomian suatu daerah bahkan suatu negara. Dalam hal ini, pemerintahlah yang harus menjadi pelopor perubahan-perubahan dalam meningkatkan faktor produksi.
- Tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau dengan kata lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat bila ada peluang kerja yang dapat menampung kegiatan masyarakat terutama yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat baik dalam meningkatkan jumlah kegiatan maupun meningkatkan jenis peluang kerja tersebut. Hal tersebut perlunya perencanaan pembangunan terutama pada daerah-daerah tertinggal.
- Perencanaan pembangunan pada era otonomi daerah dimungkinkan untuk

meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya terutama difokuskan pada pembangunan ekonomi daerah tertinggal dan daerah perbatasan yang tersebar luas diseluruh pelosok Indonesia yang jauh tersentuh oleh pembangunan ekonomi pada masa era sentralisasi. Hal ini harus menjadi prioritas pembangunan pemerintah yang tujuannya yaitu untuk menyeimbangkan pembangunan daerah yang tertinggal dengan daerah-daerah yang telah berkembang lebih maju.

Pada dasarnya teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pertumbuhan ekonomi membahas tentang cara dalam menganalisis peluang-peluang perekonomian suatu daerah dan teori-teori mana yang dapat dipakai dalam mengelola faktor-faktor produksi yang tersedia untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ada beberapa teori untuk dapat menumbuhkan dan membangun ekonomi daerah yaitu ;

1. Teri Ekonomi Neo Klasik

Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi, artinya, sistem perekonomian ini akan mencapai titik keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa pembatasan. Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang ber-upah tinggi menuju ke daerah yang ber-upah rendah.

2. Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Kelemahan model ekonomi ini bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal, dan pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar nasional maupun global.

3. Teori Lokasi

Teori ini menitik beratkan pada lokasi atau tempat, dimana pengembangan lokasi atau tempat tersebut digunakan untuk pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimalisir biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memilih tempat kegiatannya serta memaksimalkan peluang-peluang untuk mendekati pasar sasaran hasil produksinya. Kelemahan teori ini pada saat sekarang adalah

bahwa teknologi dan komunikasi sudah begitu jauh berkembang dan telah mengubah peran lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

4. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral ini didukung oleh sejumlah tempat yang menyediakan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja,, yang merupakan suatu wilayah pemukiman penyedia jasa-jasa bagi penduduk daerah disekitarnya.

5. Model Daya Tarik

Teori model daya tarik ini adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan. Teori otonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian insentif dan subsidi.

Di negara-negara berkembang, tugas utama birokrasi lebih menitikberatkan untuk memperlancar proses pembangunan. Dalam tugas-tugas pembangunan, aparat administrasi diharapkan memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut secara efektif dan efisien dan mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang menuju kearah kemajuan. Dengan demikian, wajarlah apabila para pemangku kebijakan diberi wewenang untuk mengambil kebijakan-kebijakan berdasarkan pertimbangan rasional dan pengalaman yang dimilikinya supaya pemerintah dapat berjalan dan program-program pembangunan yang sering kali membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dapat terlaksana dengan baik.

Pada era sentralistik kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dianggap rasional, tentu saja bersifat global mengenai kebutuhan dasar yaitu pemenuhan hajat hidup orang banyak terutama makanan yang sampai saat sekarang ini masih menjadi masalah yang sangat krusial dan terkadang mendatangkan konflik antara pengambil kebijakan yang satu dengan yang lain. Pelaksanaan program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah dan tentu saja mendapat insentif berupa bantuan baik berupa uang ataupun barang belum bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, walaupun dipaksakan maka hasilnya tidak efektif, hal tersebut dikarenakan tiap-tiap daerah mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda-beda.

Perbedaan-perbedaan tiap daerah tersebut menjadi permasalahan dalam membangun

perekonomian daerah, menurut Subandi (2005: 117) yaitu:

1. Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri.

Kegiatan ekonomi di tiap daerah akan berbeda-beda, konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi cenderung pesat, sedangkan daerah yang konsentrasi ekonominya rendah ada kecenderungan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonominya juga rendah.

Industri manufaktur merupakan sektor ekonomi yang secara potensial sangat produktif, hal ini dapat dilihat dari sumbangan terhadap pembentukan PDB atau PDRB. Terjadinya ketimpangan pembangunan sektor industri atau tingkat industrialisasi antar daerah adalah sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kurang berkembangnya sektor industri di luar Jawa merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi antar Jawa dengan wilayah di pulau Jawa. Pada daerah di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan Timur, Papua, bisa menjadi wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor industri manufaktur. Hal ini dapat dilihat dari dua hal yaitu, ketersediaan bahan baku dan letak geografis yang dekat dengan negara tetangga pasar yang besar disamping pasar domestik.

2. Kurang Meratanya Investasi

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar mengatakan ada korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat daerah tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri. Dalam hal industri, di Jawa tetap merupakan wilayah yang dominan bagi penanaman modal dalam negeri yaitu hampir 66 %, dan penanaman modal asing hampir 76 %, sedangkan di luar Jawa rata-rata investasi kurang dari 5 % ,

kecuali Sumatera masih di atas 10 % (sumber data BPS)

3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapasitas antar daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini karena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan perkapita antar daerah, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas, mempengaruhi mobilitas faktor produksi antar daerah. Menurut A. Lewis dalam Lincoln Arsyad (2000), jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan menjadi lebih baik.

4. Perbedaan Sumber Daya Alam

Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya akan sumber daya alamnya akan lebih maju dan masyarakat lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya. Hingga tingkat tertentu pendapat tersebut dapat dibenarkan, dalam arti sumber daya manusia hanya dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, dan selanjutnya harus dikembangkan terus-menerus, oleh karena itu diperlukan faktor-faktor lain diantaranya adalah faktor teknologi dan sumber daya manusia. Dengan penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka lambat laun faktor endowment tidak relevan lagi. Hal ini dapat kita lihat di negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura yang sangat miskin sumber daya alam.

5. Perbedaan Demografis

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan, dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran.

Disisi permintaan jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti merupakan faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi. Di sisi penawaran, jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin dan etos kerja yang tinggi merupakan aset penting bagi produksi.

6. Kurang Lancarnya Perdagangan Antar Daerah

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah, juga merupakan faktor yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional Indonesia. Tidak lancarnya perdagangan antar daerah disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Jadi tidak lancarnya arus barang dan jasa antar daerah dipengaruhi oleh pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari sisi permintaan dan penawaran

Dari sisi permintaan, kelangkaan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi lokal yang sifatnya komplementer dengan barang dan jasa tersebut. Sedangkan dari sisi penawaran, sulitnya mendapatkan barang modal, input perantara, bahan baku atau material lainnya dapat menyebabkan kegiatan ekonomi suatu daerah lumpuh atau tidak berjalan secara optimal.

III. Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara umum pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha baik secara individu maupun kelompok. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja.

Lincoln Arsyad (2000) secara garis besar menggambarkan strategi pembangunan ekonomi daerah, dikelompokkan menjadi empat (4) kelompok yaitu:

1. Strategi pengembangan fisik

Melalui pembangunan program perbaikan kondisi fisik/lokalisasi daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha daerah, secara khusus tujuan

strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, yaitu :

a. Pembuatan bank tanah,

Pembuatan bank tanah yang dimaksudkan yaitu dengan tujuan agar memiliki data tentang tanah yang kurang optimal penggunaannya, tanah yang belum dikembangkan, atau salah dalam penggunaannya dan lain sebagainya.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan/ agraris, tanah merupakan kehidupan pokok bagi penduduk di Indonesia, dengan adanya pembuatan bank tanah oleh pemerintah, masyarakat dituntun untuk menggunakan tanah dengan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanahnya, karena setiap daerah mempunyai struktur tanah yang berbeda-beda dan hanya cocok bila ditanami dengan jenis tanaman tertentu, sehingga hasilnya akan lebih optimal dan memberikan nilai tambah lebih bagi para petani.

b. Pengendalian Perencanaan dan Pembangunan

Tujuan dari pengendalian perencanaan dan pembangunan yaitu untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah dimata investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah tersebut. Dengan adanya perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk memajukan ekonomi daerahnya, hal tersebut berarti jaminan bagi para investor untuk ikut serta membangun usahanya di daerah dan seiring dengan hal tersebut maka akan tercipta pula kesempatan/peluang kerja bagi penduduk daerah tersebut.

c. Penataan Kota

Penataan kota dengan tujuan untuk memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat pertokoan, dan penempatan standar fisik suatu bangunan. Kota sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan

implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah menakutkan. Apalagi ada banyak kejadian terutama di negara berkembang, kota-kota tersebut berkembang tanpa pengendalian. Jumlah penduduk terus bertambah, ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, terjadi banjir dan sebagainya.

Kondisi kota-kota di negara berkembang, semakin hari semakin terpuruk. Meskipun, ada gejala ekonomi kota meningkat, padahal di balik itu tingkat stres warga sangatlah tinggi, jumlah orang yang sakit terus saja bertambah, jumlah penduduk dengan kualitas tinggi terus menurun, dan pada akhirnya, kota yang katanya mengalami kemajuan ekonomi itu mengalami kemunduran dalam berbagai hal.

Umumnya kota-kota besar banyak mengalami permasalahan tata ruang, tidak saja karena kota sejak awal telah dibangun dan bertumbuh secara alami, akan tetapi kota mengalami pertumbuhan lebih pesat, yang biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena cepatnya laju pembangunan di perkotaan. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya akan berakibat pada padatnya penduduk di suatu wilayah yang akan berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal.

Selain akan terjadi kepadatan dan ketidakteraturan bangunan, akan berdampak buruk juga pada sisi lainnya, antara lain, (1) kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, (2) tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurang polusi udara, (3) akses jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan besar (mobil) pada pemukiman padat penduduk, (4) kecilnya jalan akses menuju daerah tertentu karena banyak dijadikan pemukiman, (5) akses untuk mendapatkan air bersih dan air minum sulit didapat, (6) tidak adanya drainase yang baik dapat menyebabkan banjir pada saat musim penghujan, (7) kepadatan penduduk membuat banyak sampah rumah tangga menumpuk, (8) banyak penyakit yang timbul karena lingkungan yang tidak bersih, (9) buruknya instalasi kelistrikan di daerah

tersebut, (10) banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di permukiman padat karena hubungan arus pendek listrik, (11) banyaknya sungai atau drainase yang tercemar oleh limbah rumah tangga.

d. Pengaturan Tata Ruang

Tujuan tata ruang yaitu untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, dengan pengaturan tata ruang yang baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan berkembang tidak saja hanya pertumbuhan di perkotaan, tetapi akan sampai ke pelosok-pelosok daerah, karena dengan adanya penataan ruang berarti pemerintah daerah sudah merencanakan pengembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sampai ke pinggiran kota.

Untuk mewujudkan sasaran penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka kebijaksanaan pokok yang nanti dapat ditempuh yakni dengan jalan sebagai berikut : *Pertama*, Mengembangkan kelembagaan melalui penetapan organisasi pengelolaan yang mantap, dengan rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas. *Kedua*, Meningkatkan kemampuan aparatur yang dapat mendukung kegiatan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. *Ketiga*, Memasyarakatkan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat dan dunia usaha serta unsur lain. *Keempat*, Memantapkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan bagi pembangunan daerah dengan perhatian khusus pada kawasan cepat berkembang dan kawasan andalan, serta kawasan strategis. *Kelima*, Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk pengamanan terhadap kawasan yang memiliki aset penting bagi pemerintah daerah. *Keenam*, Meningkatkan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi dalam penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas (1) keterpaduan, (2) keserasian, keselarasan, dan kesinambungan, (3) keberlanjutan, (4) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, (5) keterbukaan, (6) kebersamaan dan kemitraan, (7) perlindungan kepentingan umum, (8) kepastian hukum dan keadilan, (9) akuntabilitas.

Berkaitan dengan itu, partisipasi masyarakat dalam program penataan ruang, juga menjadi isu yang masih selalu diperdebatkan. Di satu pihak ada yang menyalahkan ketiadaan partisipasi masyarakat, dan di lain pihak justru menuding pemerintah yang tidak aspiratif terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Wilayah negara Indonesia terdiri dari wilayah nasional sebagai suatu kesatuan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang masing-masing merupakan sub-sistem ruang menurut batasan administrasi. Dapat digambarkan bahwa di dalam sub-sistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan sumber daya buatan, dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Aktivitas pembangunan tersebut tentu saja memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan dimaksud. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona awal lingkungan menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan, yang kalau tidak dilakukan penggarapan secara cermat dan bijaksana, akan terjadi kemerosotan kualitas lingkungan, merusak dan bahkan memusnahkan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan.

Melihat kondisi tersebut di atas, pembangunan di Indonesia khususnya di beberapa wilayah perkotaan wajib memiliki suatu konsep perencanaan tata ruang, yang disebut dengan *Master Plan*, di mana konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan diminimalisir.

Pentingnya Penataan Ruang, antara lain, *pertama*, untuk meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten.

Kedua, meningkatkan asas manfaat berbagai sumberdaya yang ada dalam lingkungan seperti meningkatkan fungsi perlindungan terhadap tanah, hutan, air, flora, fungsi industri, fungsi pertanian, fungsi pemukiman dan fungsi lain. Kesalahan tata ruang lingkungan dapat menimbulkan dampak pada udara dan iklim, perairan, lahan dan lain-lain yang akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Ketiga, sesuai dengan Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di antaranya adalah untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah;

Bila dilaksanakan secara komprehensif dan konsekwen, maka penataan ruang dapat menjadi alat yang

efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan dan berbagai bencana lingkungan seperti banjir dan longsor. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mengindahkan kondisi lingkungan dapat menghindari permasalahan lingkungan di masa mendatang.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik, tetapi bila dilakukan dengan kurang bijaksana maka tentunya kualitas lingkungan juga akan terganggu. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang.

Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan dua sisi dari suatu mata uang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang akan berlangsung secara efektif dan efisien bilamana telah didahului dengan perencanaan tata ruang yang valid dan berkualitas. Sebaliknya rencana tata ruang yang tidak dipersiapkan dengan mantap akan membuka peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang secara efektif dan efisien yang pada akhirnya akan menyulitkan tercapainya tertib ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Pembangunan, di satu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Di pihak lain apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan, pengurasan sumberdaya alam, masyarakat konsumtif

serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.

Setelah mengetahui betapa pentingnya tata ruang, diharapkan masyarakat dapat lebih memperhatikan penataan ruang di kotanya masing-masing dan akan lebih baik jika turut berperan dalam menyediakan ruang terbuka hijau di pemukiman yg mereka tempati. Pemerintah juga diharapkan dapat mewujudkan penataan ruang yang adil dan tepat guna mewujudkan kenyamanan dan keharmonisan dalam masyarakat. Semoga bermanfaat.

- e. Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik

Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (pasal 1 ayat 2).

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur (pasal 1 ayat 3).

Pembangunan perumahan diyakini juga mampu mendorong lebih dari seratus macam kegiatan industri yang berkaitan dengan bidang perumahan dan permukiman (Sumber: Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Permukiman)

Dengan adanya perumahan dan pemukiman baru, akan muncul aktivitas baru, kebutuhan rumah tangga baru, kegiatan-kegiatan baru dan dengan demikian akan tercipta kegiatan ekonomi baru yang berpengaruh positif bagi dunia usaha, disamping menciptakan lapangan kerja baru.

- f. Menyediakan infrastruktur

Penyediaan infrastruktur ini berupa sarana air bersih, taman, sarana

parkir, tempat olah raga dan lain-lain. Infrastruktur merupakan layanan fasilitas yang diperlukan kebutuhan hidup masyarakat, selain itu juga dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kreativitas atau daya tahan kegiatan ekonomi dunia usaha adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan dunia usaha tersebut, diperlukan alat-alat pendukung antara lain yaitu ;

- a. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang bersamaan mencegah penurunan kualitas lingkungan.
- b. pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perizinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah.
- c. pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan.
- d. pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor serta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis.
- e. pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang). Lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru dan pencarian pasar baru.

3. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi, oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- a. pelatihan dengan *system costumized training*, yaitu sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan sipemberi kerja.
- b. Pembuatan bank keahlian sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang sedang mencari pekerjaan dan mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah.

4. Strategi Pengembangan Masyarakat

Strategi pengembangan masyarakat ini ditujukan untuk memberdayakan kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di indonesia belakangan ini, karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial seperti halnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.

IV. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Perekonomian Daerah

Pada era globalitas saat ini, pemerintah harus memegang peranan penting dalam memajukan perekonomiannya, segala cara harus dilakukan untuk menciptakan ide-ide atau inovasi-inovasi baru dan tidak lagi hanya sebagai penonton pasif yang hanya menunggu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang diserahkan begitu saja pada mekanisme kekuatan-kekuatan ekonomi di luar pemerintah. Pemerintah mempunyai kekuatan yang besar dalam memajukan perekonomian disamping masih ada kekuatan lain yaitu perusahaan swasta yang mana perusahaan swasta tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi saat ini.

Kegiatan-kegiatan yang pertama-tama harus dilakukan oleh pemerintah yaitu penguatan pada bidang-bidang yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti transportasi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, selain kewajiban pemerintah/negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, juga pihak lain/swasta tidak akan mau mengorbankan investasi untuk pengeluaran-pengeluaran tersebut karena resiko kerugian sangat besar, kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan swasta bertujuan untuk meraih keuntungan pada saat sekarang juga hari-hari berikutnya.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan (direalisasikan) oleh pemerintah

tersebut di atas, maka akan memunculkan kegairahan pelaku-pelaku ekonomi untuk lebih giat merencanakan usaha-usaha yang memungkinkan dapat dijalankan bagi kegiatan mereka. Dengan demikian akan muncul usaha-usaha yang dibutuhkan masyarakat dalam istilah ekonomi akan muncul penawaran yang diakibatkan oleh adanya permintaan atau sebaliknya, dan tugas pemerintah berikutnya yaitu peraturan/kebijakan dan pengawasan dalam rangka mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah mempunyai peran strategis dalam perekonomian suatu negara, baik sebagai pelaku maupun sebagai fasilitator.

Melalui berbagai kebijakan yang terkait sektor publik, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan jalan :

1. Melakukan investasi
2. Menarik investasi
3. Mendorong perkembangan teknologi
4. Menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja.

(Hamid & Ato, dalam Akadun, 2000;1)

Secara historis telah berkembang perbedaan pemikiran antara dua kutub yang menyatakan perlu atau tidaknya peran pemerintah, yang sebenarnya perbedaan tersebut hanya terletak pada besaran atau kadar dari peran tersebut (bisa dilihat dari mata kuliah sistem ekonomi mengenai hal ini)

Adam Smith yang dipandang sebagai pendukung sistem pasar pada dasarnya juga memberikan peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara tetapi terbatas. Dengan demikian pemerintah tetap memegang peranan penting dalam mengatur perekonomian suatu suatu negara, dikarenakan pengaturan kebijakan berada pada tangan pemerintah.

Di era globalisasi sekarang ini, pemerintah harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bisa tercapai bila pemerintah berperan aktif dalam pembangunan ekonomi sehingga terwujud dalam bentuk kenaikan pendapatan masyarakat secara keseluruhan atau pendapatan nasional.

Pembangunan ekonomi nasional haruslah menuju kearah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan demikian pembangunan ekonomi tidak hanya berpusat di perkotaan / di pusat saja, akan tetapi lambat laun pembangunan tersebut akan memperluas tujuan pembangunan sampai ke daerah-daerah (kabupaten atau kota) yang secara kenyataan bahwa pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah sangatlah tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan pembangunan di wilayah perkotaan/pusat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mulai pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan masalah alokasi sumber daya yang dimiliki, sumber daya diperlukan sebagai faktor produksi yang penting yaitu tenaga kerja/sumber daya manusia, sumber daya alam dan modal, karena menurut teori-teori ekonomi faktor-faktor produksi tersebut sangat ampuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Lincolin arsyad (Subandi 2007;119-120) berpendapat bahwa ada 4 (empat) peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi di daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan di daerah.

1. Entrepreneur

Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur, adalah merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah daerah dengan lebih baik dan ekonomis, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

2. Koordinator

Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran ini pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah.

Dalam kaidah ekonomi yang sudah umum, sumber daya yang dimiliki relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan yang akan ingin dicapai oleh manusia, dengan demikian bagaimana caranya agar penggunaan sumber daya ekonomi dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Disamping itu alokasi penggunaan sumber daya harus memiliki keterkaitan dengan skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa pertanyaan yang mesti diperhatikan (Munawir *et al.* 2014;19) yaitu :

- a. Kemana sumber daya dialokasikan ?. sumber daya yang tersedia perlu diprioritaskan terlebih dahulu untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dan bersipat mendasar. Jangan sampai sumber daya dialokasikan untuk menghasilkan

- barang-barang mewah guna memenuhi kebutuhan segelintir orang, sementara itu disekitarnya banyak orang kelaparan, serba kekurangan dan hidup di bawah jembatan.
- b. Bagaimana hasil produksi tersebut didistribusikan ?. Produk didistribusikan kepada mereka yang terlibat sesuai dengan kontribusi masing-masing, tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang tidak terlibat secara langsung karena memang tidak bisa aktif (orang cacat, yatim piatu) tetap mendapat bagian melalui mekanisme redistribusi antar pelaku ekonomi.
 - c. Dimana dan bagaimana menghasilkannya ?. Hal ini perlu diperhatikan karena keduanya memiliki implikasi penting terhadap distribusi kesejahteraan. Distribusi kesejahteraan ini sangat vital dalam ekonomi, lebih-lebih bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan tingkat keragaman tinggi, baik dalam hal kesejahteraan maupun potensi ekonominya tiap daerah . Di masa depan, aktivitas dan kesejahteraan ekonomi harus lebih merata dan menyebar ke seluruh wilayah nusantara. Terlebih lagi dari cakupan wilayah yang lebih kecil yaitu daerah.
 - d. Apa saja sumber daya yang dimiliki dan bagaimana pendistribusiannya ?. Indonesia harus memiliki catatan tentang sumber daya yang dimiliki. Indonesia memiliki wilayah luas dan sumber daya alam yang melimpah ‘ dimana kekayaan sumber daya yang dimiliki tiap-tiap daerah yang berbeda-beda’ namun belum terdokumentasi dengan baik, padahal masalah ini merupakan soal yang sangat penting karena menyangkut kekayaan yang dimiliki. Disamping itu, aturan kepemilikan sumber daya harus jelas dan adil, karena kejelasan dan keadilan dalam memiliki, implikasinya penting terhadap kesejahteraan.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah dapat juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana dan strategi-strategi pelaksanaannya. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, serta untuk menjamin bahwa perekonomian di daerah akan mendapatkan manfaat yang optimal.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di

daerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah (*zoning*) yang lebih baik.

Peran fasilitator tidak saja hanya penyediaan atau perbaikan lingkungan, tetapi pemerintah daerah harus membantu dunia usaha dalam memberikan kemudahan perijinan bagi investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya juga mencegah kelestarian lingkungan alam sekitarnya. Karena kalau tidak demikian, maka investor akan seenaknya mengeksploitasi kekayaan alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan brosur-brosur pembangunan kawasan industri, pembuatan outlet untuk produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, membantu UMKM dan koperasi untuk melakukan pameran dan sebagainya.

C. PENUTUP

Pembangunan ekonomi merupakan perubahan aktivitas yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau yang tadinya ada menjadi bertambah besar, bertambah luas, bertambah maju dalam konteks kegiatan ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut bukan saja merupakan keuntungan bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat luas dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Di era globalisasi sekarang ini, pembangunan perekonomian harus melibatkan semua pihak, terutama peran pemerintah yang harus lebih dominan dikarenakan pemerintah mempunyai aturan-aturan serta kemampuan yang mendukung terhadap tumbuh dan berkembang perekonomian suatu daerah, sehingga pembangunan ekonomi daerah berkembang yang pada akhirnya tingkat pendapatan penduduk meningkat, kesempatan kerja bertambah, daya beli meningkat dan masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan perekonomian daerah tersebut.

Tujuan dari Undang-undang otonomi daerah adalah untuk memberi kaluasaan pada pemerintah daerah yaitu bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi daerah masing-

masing yang pada gilirannya juga ikut serta membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional,

Dari uraian tersebut di atas, dimana pemerintah harus menjadi pelaku ekonomi secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan beberapa strategi pengembangan yang dapat dilakukan untuk pembangunan dunia usaha, sehingga pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerahnya mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan pesan-pesan yang terkait dengan otonomi daerah.

Banyak dari pemerintah daerah yang sejak diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah pertumbuhan dan pembangunan ekonominya tidak pernah berubah, memang dalam pembangunan ekonomi suatu daerah bukan perkara yang gampang segampang membalikan telapak tangan, akan tetapi apabila pemerintahnya mempunyai keinginan yang kuat untuk perubahan dalam tatanan ekonomi yang lebih baik dan maju, hal tersebut bukan hal yang mustahil karena ada juga daerah-daerah yang perekonomiannya lebih maju setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah. Dengan demikian, kemajuan pembangunan

ekonomi daerah tergantung dari niat dan keinginan yang kuat dari pengambil kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*. Alfabeta: Bandung.
- Arsyad, Lincolin. 2000. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- Handoko Hani. *Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Ismail Munawar, et. Al. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Pamuji, S. 1989. *Ekologi Administrasi Negara*. Bina Aksara. Jakarta
- Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Subandi. 2007. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Ticoalu G. A. 2013. *Penerjemah Dasar-dasar Manajemen (G. R. Terry & Leslie W. Rue)*. Jakarta: Bumi Aksara.